

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

Sub bab ini pada dasarnya terdiri dari kerangka teori mengenai subjek penelitian tentang pengelolaan ekosistem mangrove. Keberlanjutan mangrove ini, tentunya sangat diperlukan untuk daerah konservasi mangrove. Oleh karena itu, perlunya partisipasi di antara anggota dan bukan anggota kelompok untuk memengaruhi keberlanjutan hutan mangrove tersebut.

1. Konservasi Mangrove

Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan manfaat yang di dapatkan dengan cara mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang khususnya untuk memelihara keseimbangan lingkungan dan menjaga fungsinya sebagai pelindung fisik dan biologis vegetasi di hutan mangrove. Secara konseptual pengelolaan hutan mangrove ini lebih menekankan pada prinsip dasar yang terintegrasi, sebagai berikut:

- 1) Prinsip konservasi dengan menerapkan pemeliharaan, melindungi, dan berkontribusi untuk memperbaiki sumber daya alam serta mempunyai kepedulian tanggung jawab untuk berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya secara berkelanjutan melalui penerapan seluruh prinsip yang berhubungan dengan konservasi alam tentang fungsi ekologis.
- 2) Prinsip konservasi budaya ini bertujuan untuk menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi dari keagamaan masyarakat setempat.
- 3) Prinsip partisipasi masyarakat juga harus berdasarkan tentang kegiatan musyawarah dan tentunya selalu mengutamakan adanya persetujuan dari seluruh masyarakat setempat, namun tetap menghormati nilai-nilai sosial budayanya.
- 4) Prinsip ekonomi dalam pengembangan kawasan mangrove ini juga harus memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat setempat sehingga mereka juga akan mendapatkan hasil yang lebih optimal kedepannya.

- 5) Prinsip edukasi. Prinsip ini ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat sekitar. Prinsip ini menggunakan pendidikan sebagai media utamanya untuk menciptakan kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi tentang pelestarian lingkungan.

2. Hutan Mangrove

Hutan mangrove adalah bentuk komunitas dari vegetasi pantai tropis yang hidup di kawasan lembab dan berlumpur serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Karakteristik habitat yang sangat menonjol di kawasan hutan mangrove ialah tumbuhan pada daerah intertidal yang jenis tanahnya berlumpur, berlempung, atau berpasir, dan daerah atau lahannya tergenang air laut. Tumbuhan mangrove ini sebenarnya dapat tumbuh dengan baik di daerah substrat yang berlumpur dan perairan pasang yang menyebabkan keadaan anaerob. Hal ini dikarenakan kawasan mangrove ini mempunyai akar khusus yang berfungsi untuk menyangga maupun menyerap oksigen di atas permukaan air secara langsung. Adapun karakteristik lainnya adalah mempunyai jenis pohon yang relatif sedikit.

Pada dasarnya ekosistem mangrove mempunyai fungsi ekologis, fungsi biologi, fungsi ekonomis, dan fungsi sosial. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain: adanya keseimbangan ekosistem perairan pantai, melindungi pantai terhadap abrasi maupun erosi, menjaga dari terjadinya hempasan angin, mengendalikan banjir, menyaring bahan-bahan beracun, menjadi tempat berlindung dan berpijah berbagai jenis udang, ikan, dan berbagai biota laut lainnya serta menyediakan makanan untuk para biota laut (Rizka, 2010).

Fungsi secara biologinya, antara lain: sebagai tempat hidup berbagai satwa lain sedangkan fungsi ekonominya dijadikan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, sumber bahan kayu untuk bangunan dan kayu bakar, menghasilkan bahan pangan seperti ikan, udang, kepiting, dan lainnya, serta daunnya dapat dijadikan obat-obatan, terus bermanfaat untuk menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar pesisir (Kharuniastuti, 2013). Namun, pada fungsi sosialnya, hutan mangrove dapat menyebabkan timbulnya ketergantungan masyarakat di sekitar wilayah mangrove khususnya sebagai mata pencaharian dari biota mangrove sehingga dapat meningkatkan

keaktifan masyarakat di bidang komunikasi, seperti memberikan ide-ide tentang pengelolaan ekosistem mangrove dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Keterlibatan seluruh masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove ini sangat berguna untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan yang biasanya digunakan untuk area tambak, permukiman, industri, dan penebangan hutan. Rachana (2011) menyebutkan bahwa kurangnya ekosistem mangrove dalam jangka panjang ini dapat mengganggu seluruh ekosistem mangrove dan pesisir.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan atau program-program yang tentunya dapat menimbulkan dampak positif (Budiman, 2018). Partisipasi adalah proses-proses yang dapat memunculkan interaksi di antara stakeholders dan masyarakat sehingga akan menyebabkan timbulnya kesepakatan-kesepakatan maupun interaksi yang lebih inovatif. Partisipasi ini dapat melibatkan masyarakat di setiap kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan implementasi program-program yang telah disepakati bersama.

Partisipasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari terlaksananya sebuah kebijakan yang bersifat membangun khususnya di beberapa program yang diinginkan. Biasanya kebijakan ini dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat tentang peran dan tanggung jawabnya. Partisipasi masyarakat ini sebenarnya mempunyai arti yang sangat penting untuk memperoleh sebuah informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap dari seluruh masyarakat setempat. Biasanya mereka akan membahas tentang pengelolaan ekosistem mangrove. Selanjutnya, mereka akan beranggapan bahwa masyarakat lokal akan mendapatkan hak yang besar untuk mengeluarkan pendapat tentang peningkatan pengelolaan ekosistem mangrove.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove ini dapat dilihat di tahap pelaksanaan. Tahapan ini diukur dari keaktifan masyarakat di dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan program kegiatan dan menyediakan beberapa sumbangan pemikiran, keahlian, keterampilan, dan ketersediaan mereka untuk

memberikan materi maupun tanggung jawab supaya dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan.

4. Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Keterlibatan masyarakat di dalam seluruh kegiatan konservasi ini tentunya dapat meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove dengan cara mengembangkan sosial budaya masyarakat pesisir. Kegiatan ini dapat diadakan melalui penyuluhan, penerangan, dan membangkitkan tingkat kepedulian masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa jalur hijau mangrove termasuk salah satu bentuk dari zona preservasi. Pemberlakuan kawasan mangrove sebagai tempat ekowisata ini dapat meningkatkan potensi tingkat perekonomian masyarakat tanpa melibatkan adanya eksploitasi.

Pengelolaan ekosistem mangrove ini dapat ditingkatkan melalui perkembangan tingkat kualitas dan eksistensinya kawasan mangrove tersebut. Namun, kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan antara lain: tebang habis, pengalihan aliran air tawar seperti pembangunan irigasi, konversi lahan mangrove menjadi pertanian, perikanan, dan permukiman, tidak melakukan pembuangan sampah cair maupun padat secara sembarangan, tidak mencemari kawasan mangrove dengan tumpahan minyak, serta kegiatan penambangan dan ekstraksi mineral di dalam atau di luar maupun daerah sekitar hutan.

Menurut Kementrian Kehutanan tahun 2013 pengelolaan ekosistem mangrove yang berbasis masyarakat ini termasuk bagian dari kebijakan strategi nasional yang berguna untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan secara berkelanjutan serta mengikuti berbagai macam asas, yaitu transparansi (dapat diakses oleh semua pihak dalam tahap peninjauan), partisipatif (dapat mengakomodasikan semua bentuk komitmen dari para *stakeholders*, akuntabilitas (dapat mensosialisasikan kepada seluruh publik untuk melakukan pengkajian secara menyeluruh, ilmiah, dan dipertanggungjawabkan), responsive (mampu melakukan antisipasi terhadap adanya sebuah perubahan dari komitmen lokal, nasional, maupun global terhadap pengelolaan ekosistem mangrove), efisien (mempunyai sebuah kemampuan yang dapat dilakukan

untuk menselaraskan bentuk kebijakan dari pemangku kepentingan maupun masyarakat), efektif (melaksanakan sesuai dengan tepat sasaran oleh berbagai pihak), dan bekeadilan (dapat memberikan sebuah manfaat yang telah disesuaikan dengan bentuk tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat).

Pengelolaan mangrove secara berkelanjutan juga dapat dilakukan dengan memberikan pengakuan dari masyarakat lokal dan berbagai macam bentuk kearifan lokalnya. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, nilai-nilai luhur yang telah berlaku terhadap bentuk tata kehidupan dari masyarakat perlu diaktifkan kembali untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

5. Tingkat Pengetahuan

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi seluruh individu untuk ikut berpartisipasi di dalam suatu kegiatan. Disamping itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi motivasi dalam berpartisipasi (Rusdianti, 2012). Taraf pendidikan yang beragam juga akan memengaruhi daya nalar setiap individu, sehingga kemungkinan terbesarnya adalah mereka dapat melakukan penafsiran yang berbeda terhadap program yang dilaksanakan di dalam pengelolaan ekosistem mangrove tersebut. Sedangkan menurut Rahlem et al. (2017), perbedaan tingkat pendidikan setiap responden dapat memengaruhi pola pikir dan partisipasi mereka di setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan maupun menjaga perkembangan mangrove.

Tingkat pendidikan masyarakat setempat yang tergolong rendah ini juga dapat mengakibatkan pola berpikir dan tindakan masyarakat saat mempertimbangkan sesuatu keputusan menjadi terbatas, terutama di dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tentunya hal ini dapat berimplikasi terhadap: rendahnya tingkat adopsi inovasi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan ekosistem, dan perilaku yang tidak berwawasan lingkungan saat berinteraksi dengan lingkungan hidupnya.

6. Co-Management

Co-management adalah pengelolaan yang dilakukan secara bersama-sama di antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder (Hamzah et al., 2020). *Co-management* ini

juga dapat didefinisikan sebagai pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang di antara pemerintah dan masyarakat lokal saat mengelola sumberdaya dan lingkungan. Pendekatan *co-management* merupakan pendekatan menengah dari adanya pendekatan *state-based* dan pendekatan *community based*.

Pendekatan *state-based* ini menempatkan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya yang sangat terbatas. Pendekatan ini lebih didominasi oleh peran pemerintah dan bersifat *top-down*. Sedangkan pendekatan *community based* lebih mengesampingkan peran pemerintah dan biasanya masyarakat lebih sering bergerak sendiri di dalam pengelolaan lingkungan sehingga tidak adanya arahan dan pengetahuan teknis yang dibutuhkan dari pemerintah, sehingga pelaksanaannya tidak terprogram dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan *co-management* adalah alternatif untuk mengatasi kelemahan dari pendekatan *state-based* dan *community-based*. Hal ini dikarenakan konsep *co-management* lebih menunjukkan kebersamaan dan kemitraan di antara pemerintah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tentang pembangunan berkelanjutan.

Secara umum *co-management* bertujuan untuk menjaga status pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan supaya dapat menjadi lebih tepat, lebih efisien, lebih adil dan merata. Sedangkan secara khusus tujuan *co-management* adalah melakukan perubahan dengan menerapkan pembangunan berbasis masyarakat, mewujudkan terjadinya proses pengambilan keputusan secara desentralisasi sehingga dapat memberikan hasil yang lebih efektif.

Menurut Ahmad Muqorrobin, Fredinan Yulianda (2013) bentuk *co-management* ada 6 yaitu ; 1) instruktif adalah keputusan dibuat oleh pemerintah dan diinformasikan kepada masyarakat sebelum dilaksanakan sehingga di antara masyarakat dan pemerintah tidak banyak bertukar informasi. 2) konsultatif adalah pandangan lokal untuk memulai pertimbangan sebelum membuat sebuah keputusan sehingga masyarakat dan pemerintah mempunyai posisi yang sama. 3) komunikatif adalah pertukaran informasi di awal dengan mengkaitkan pandangan masyarakat pada beberapa agenda maupun isu. 4) advokasi adalah keterlibatan masyarakat terkait hal-hal tertentu di dalam proses

kebijakan, pengambilan keputusan yang biasanya dapat diambil secara bersama. 5) keterlibatan adalah masyarakat diberikan hak penuh untuk merencanakan dan mengambil keputusan bersama pemerintah. 6) kontrol masyarakat adalah seluruh kebijakan disusun oleh masyarakat dan menggunakan peran masyarakat untuk mengaturnya sehingga peran masyarakat lebih besar daripada pemerintah. Dalam konsep co-management, pemangku kepentingan adalah semua pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan, dan aksi dari sebuah sistem tersebut. Oleh karena itu, pemangku kepentingan dapat berbentuk individu, kelompok sosial maupun komunitas. Namun, pengelolaan dalam lingkup partisipatif atau berbasis masyarakat ini sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk aktif dalam kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove.
- 2) Membagikan beberapa peran dan tanggung jawab terhadap bentuk pengelolaan yang berbeda-beda berdasarkan kondisi yang terjadi dengan memberikan kewenangan tertinggi kepada lembaga masyarakat maupun instansi pemerintah terhadap beberapa kasus yang akan dialami.
- 3) Dalam pengelolaan kerangka kerjanya, tetap memperhatikan maksud dari fungsi ekologis konservasi, fungsi ekonomi, sosial, dan budaya dengan memberikan perhatian lebih ke bagian sumberdaya, keseimbangan, dan partisipasi.

Keberhasilan co-management ini, dapat dipengaruhi oleh tiga tingkatan, yaitu : tingkat supra komunitas (*supra community level*), tingkat komunitas (*community level*), serta tingkat individu dan rumah tangga (*individual and household level*). Selain itu, penunjang keberhasilan co-management yaitu: partisipasi masyarakat, dukungan organisasi masyarakat, dukungan jangka panjang dari pemerintah lokal (*desa/kelurahan*) tentang sumberdaya, dan timbulnya keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam proses co-management. Pada umumnya pembentukan sebuah kelompok ditujukan untuk mengelola ekosistem sumberdaya mangrove, namun harus berdasarkan dari ke-6 kriteria khusus, supaya prinsip co-management dapat dilaksanakan dengan sistematis yaitu organisasi yang interaktif, control lokal, dukungan masyarakat, proses yang terencana,

keragaman anggota, dan prinsip yang membahas keseluruhan aspek. Pada umumnya dari enam prinsip ini empat diantaranya menggambarkan proses terbentuknya institusi dan dua prinsip lainnya menggambarkan nilai keefektifan institusi tersebut (Indrawasih, 2008).

7. Uji Mann Whitney

Uji Mann Whitney adalah pengujian non parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median terhadap dua kelompok bebas yang mempunyai skala data ordinal, interval, dan ratio namun data tersebut tidak berdistribusi normal (Raharjo, 2017). Uji Mann Whitney biasanya disebut sebagai Wilcoxon rank sum test. Pengujian ini digunakan apabila uji independennya tidak dapat dilakukan karena asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Pada dasarnya Uji Mann Whitney tidak digunakan untuk menguji mean, namun terdapat beberapa ahli yang menyatakan bahwa uji ini juga melakukan pengujian terhadap mean (Raharjo, 2017). Hal ini dikarenakan, data median dua kelompok pada dasarnya akan menjadi sama, akan tetapi nilai dari P Value hasilnya $< 0,05$ sehingga menunjukkan adanya perbedaan. Permasalahan ini dipengaruhi karena nilai mean diantara kedua kelompok. Oleh karena itu, asumsi yang harus terpenuhi dalam pengujian Mann Whitney U Test, sebagai berikut:

1. Skala data variabel terikat adalah ordinal, interval, dan rasio. Apabila skala interval dan rasio, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. (Normalitas dapat diketahui saat pengujian normalitas telah dilakukan)
2. Data biasanya berasal dari 2 kelompok. (Namun apabila data berasal dari 3 kelompok atau lebih, maka akan lebih baik menggunakan uji kruskall wallish).
3. Variabel independent satu dengan yang lainnya, artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan.
4. Nilai varians kedua kelompok adalah sama atau homogen. (Hal ini dikarenakan data tidak berdistribusi normal, maka pengujian homogenitas dapat dilakukan dengan uji Levene's Test. Sedangkan uji fisher-F digunakan untuk asumsi normalitas terpenuhi).

B. Tinjauan Pustaka

Pada sub bab ini berisi tentang beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata mangrove berbasis komunitas. Selain itu, permasalahan dalam keberlanjutan mangrove akan dibahas pada sub bab ini.

1. Keberlanjutan mangrove

Menurut Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2008) hutan mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi, penahan intrusi air laut, penahan angin, dan menurunkan kadar CO₂. Berdasarkan aspek biologi mangrove berfungsi sebagai habitat bagi biota laut, sumber pakan organik bagi biota laut, dan habitat bagi satwa darat, udara, dan laut. Sedangkan dari aspek sosial dan ekonomi sebagai tempat kegiatan wisata alam, penghasil kayu, penghasil pangan, dan obat-obatan, serta tempat mata pencaharian masyarakat lokal.

Konsep konservasi penting dilakukan untuk keberlanjutan mangrove. Kegiatan konservasi termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pemeliharaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove secara layak. Menurut Basir (2018), konservasi merupakan pendekatan berkelanjutan dimana pengelolaan bentang alam diarahkan pada kelestarian sumber daya alam, sedangkan pengelolaan budayanya bertujuan pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan kegiatan konservasi ditujukan terhadap upaya untuk menjaga kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam di waktu sekarang hingga masa mendatang. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan acuan untuk konservasi mangrove dengan menggunakan jenis metode yang berbeda-beda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, (2017), konservasi ekosistem mangrove menunjukkan bahwa ekosistem mangrove di Pulau Tanakeke, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai peranan yang sangat penting baik dari segi fisik, ekologi maupun ekonomi sehingga ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem mangrove terhadap tingkat eksploitasi dan laju degradasinya semakin meningkat dan mengakibatkan perekonomian masyarakat semakin menurun. Pentingnya

pemahaman masyarakat yang baik dalam memahami keberlanjutan mangrove ditandai dengan cara masyarakat mengelola kawasan hutan mangrove.

Penelitian mengenai nilai ekosistem hutan mangrove yang dilakukan oleh Laksananny et al., (2020) menunjukkan bahwa manfaat langsung yang diperoleh oleh masyarakat merupakan sebagian dari keseluruhan manfaat hutan mangrove. Keberadaan hutan mangrove memberikan kontribusi ekonomi yang cukup tinggi. Kontribusi besar yang dihasilkan berasal dari manfaat tidak langsung, tetapi untuk nilai manfaat langsung seperti nilai biota air dan pengambilan kayu bakar cukup tinggi. Keberadaan serasah mangrove menjadi faktor pendukung ketersediaan makanan bagi kepiting bakau sehingga mangrove yang bagus dapat memberikan perlindungan dan keberlangsungan kepiting bakau yang baik dibandingkan dengan mangrove yang sudah mulai rusak. Pada nilai pilihan bertujuan pada kesediaan masyarakat untuk memanfaatkan mangrove sebagai ekowisata. Namun hasil penelitian Ulyah et al., (2022) menunjukkan struktur dari kumpulan-kumpulan vegetasi mangrove di Kepulauan Karimunjaya sebanyak 7 jenis seperti *Avicennia marina*, *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora stylosa*, *Ceriops decandra*, *Ceriops tagal*, *Lumnitzera racemosa* dan *Excoecaria agallocha*.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Partisipasi dapat menimbulkan interaksi yang lebih baik diantara stakeholders. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove harus dilaksanakan dengan besarnya keinginan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan mangrove dengan mempertimbangkan perubahan pola pikir masyarakat untuk selalu melindungi dan memperbaiki ekosistem mangrove.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti et al., (2018) menunjukkan bahwa sekitar 85 % masyarakat di wilayah pesisir Laut Arafura yaitu masyarakat Pantai Nasem, Payum dan Kumbe, telah paham tentang pentingnya ekosistem mangrove bagi kehidupan mereka. Masyarakat memahami bahwa mangrove dapat bermanfaat sebagai sumber mata pencaharian dan pelindung pantai dari ombak dan abrasi serta menyadari bahwa ekosistem mangrove saat ini dalam kondisi kurang baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hadiani (2017), menunjukkan bahwa selama kurun waktu, tahun 1990-2015, hutan mangrove di Kota Pasuruan semakin

bertambah luasannya walau sebelumnya terjadi alih fungsi hutan. Bentuk partisipasi kelompok tani mangrove, seperti tenaga, sosial, uang, harta benda, keterampilan dan buah pikiran. Faktor yang mempengaruhi partisipasi kelompok terbagi menjadi faktor internal individu yaitu pekerjaan, pengetahuan, manfaat yang diperoleh, internal kelompok yaitu kepemimpinan, solidaritas anggota dan eksternal yaitu kebijakan, program, situasi politik, dan komunikasi yang baik antar stakeholder.

Hasil penelitian oleh Alfandi et al., (2019), menunjukkan bahwa partisipasi kelompok PAPELING tergolong dalam partisipasi terapi dan pasif. Hal ini ditandai dengan sudah terbangunnya komunikasi walaupun masih terbatas dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan masih rendah. Informasi dan inisiatif hanya datang dari satu arah yaitu pemerintah dan pihak luar lainnya sedangkan anggota kelompok hanya dilibatkan ketika ada kegiatan pembibitan. Peran pemerintah yang masih top down mengakibatkan masyarakat mempunyai batasan ruang gerak dalam pengelolaan mangrove dan penyampaian aspirasi sehingga dukungan dari berbagai pihak mempunyai peran yang sangat penting. Namun hasil penelitian Yuliani & Herminasari, (2017) menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan pengelolaan hutan mangrove dan bentuk kerjasama dengan lembaga lain sudah cukup baik tetapi harus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan aspek keterlibatan masyarakat dalam perawatan bibit mangrove dengan melibatkan sosialisasi maupun pelatihan secara konsisten. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam merawat dan mengevaluasi beberapa program yang telah dilaksanakan akan mengancam ekosistem mangrove.

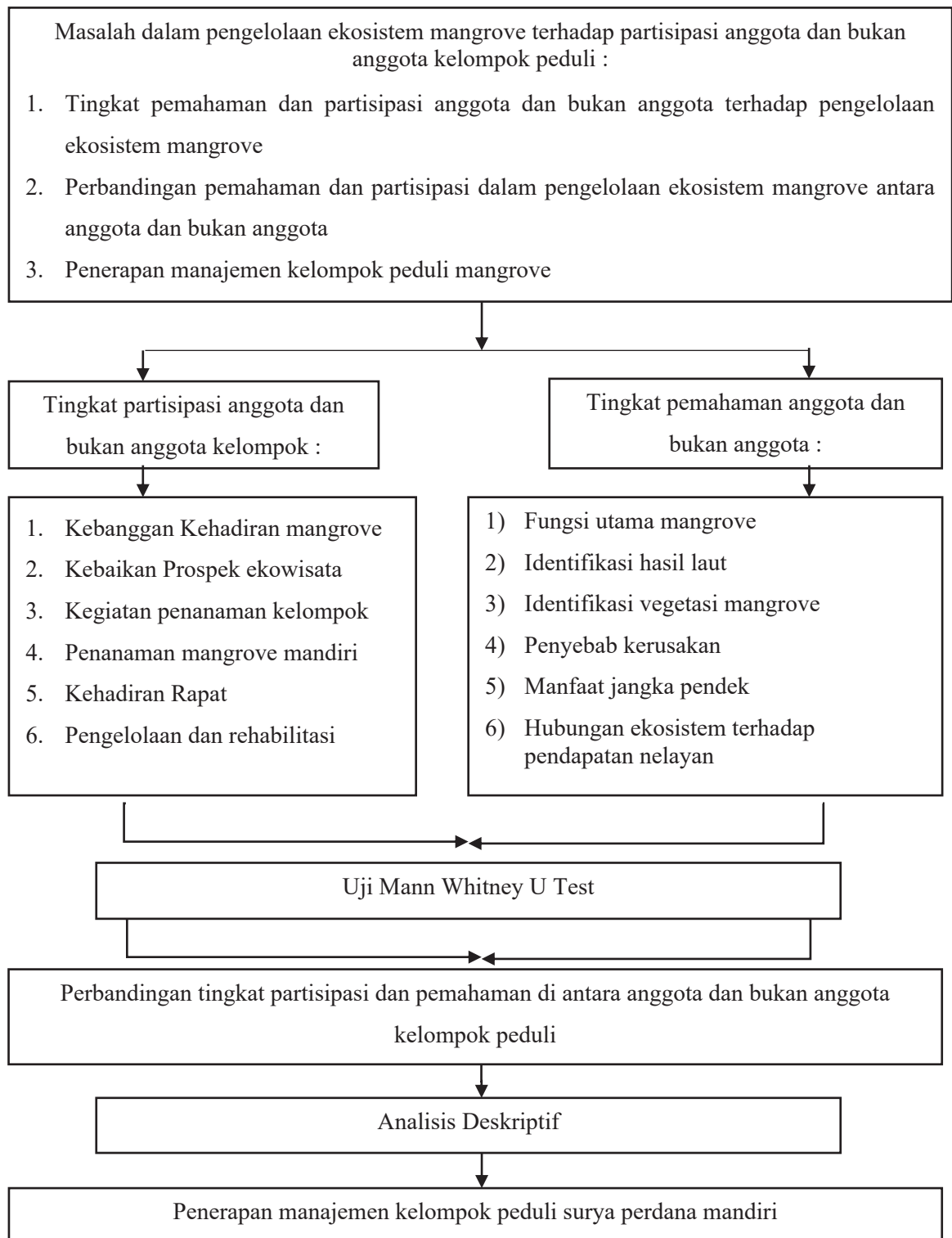
C. Kerangka Konsep

Hutan mangrove mempunyai empat fungsi penting bagi alam dan manusia. Berdasarkan fungsi ekologisnya, hutan mangrove dapat membantu meminimalisir terjadinya abrasi dan tentunya dapat meredam kekuatan gelombang maupun menjaga makanan untuk biota air sedangkan di fungsi sosialnya, mangrove dapat meningkatkan ketergantungan masyarakat di sekitar wilayah mangrove. Namun, pada fungsi biologinya mangrove memengaruhi tempat hidup satwa.

Pada dasarnya penelitian ini membahas tentang pemahaman dan partisipasi masyarakat pesisir terhadap pengelolaan ekosistem mangrove khususnya tentang kasus kehadiran kelompok peduli di Kota Singkawang. Oleh karena itu, sudah seharusnya keterlibatan anggota dan bukan anggota sangat diperlukan untuk menjaga pengelolaan ekosistem mangrove. Namun, hingga saat ini yang mempunyai tingkat kepedulian terhadap kawasan mangrove hanyalah anggota saja, sedangkan bukan anggota belum menunjukkan keterlibatannya sama sekali.

Keterlibatan mereka ini juga dapat ditunjukkan dari tingkat pemahaman dan partisipasinya terhadap kawasan mangrove, sehingga pemahaman anggota dan bukan anggota dapat diukur melalui: fungsi utama mangrove, identifikasi jenis hasil laut, identifikasi jenis vegetasi mangrove, hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan mangrove, manfaat jangka pendek yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, serta adanya hubungan yang dapat ditimbulkan oleh ekosistem mangrove sehingga dapat mempengaruhi pendapatan nelayan. Sedangkan partisipasi anggota dan bukan anggota dapat diukur dari; kebanggannya terhadap hadirnya hutan mangrove di sekitar daerahnya, pendapat mereka tentang prospek ekowisata saat ini, keterlibatannya dalam kegiatan rehabilitasi yang dilakukan secara mandiri maupun dari kelompok, kehadirannya dalam kegiatan rapat rutin, dan pendapat mereka tentang aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan mangrove maupun rehabilitasi. Dengan adanya pengukuran tersebut, tingkat pemahaman dan partisipasi di antara anggota dan bukan anggota dapat diakumulasikan sehingga kedepannya dapat dilakukan sebuah tindakan yang relevan dengan daerah konservasi mangrove tersebut.

Sebenarnya pemahaman dan partisipasi ini mempunyai keterkaitan satu sama lain sehingga dengan adanya pengukuran ini, peneliti dapat melihat ada atau tidaknya perbedaan pemahaman dan partisipasi di antara anggota dan bukan anggota. Selain itu, kita juga dapat melihat pemahaman dan partisipasi tertinggi diperoleh oleh anggota atau bukan anggota. Selanjutnya penerapan manajemen kelompok ini dapat diukur dari: kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tentang pengelolaan ekosistem mangrove dan diukur menggunakan *co-management*.



Gambar 1. Kerangka Konsep